

**PENGARAUH SPT PAJAK, PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo)**

Oleh :

Bayu Adi

(Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

Abstraksi

Sejak bergulirnya otonomi daerah sampai dengan sekarang 2013 Anggaran (RASK) banyak di teliti agar anggaran tersebut menjadi efektif, efisien serta dalam rangka meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas sehingga menjadi dinas yang berwibawa, jujur dan bertanggung jawab. sehingga standar analisis belanja, tolak ukur kinerja serta standar biaya dapat mencapai anggaran kinerja yang riil. Sedangkan dalam hal lain Menurut putranto (1999) untuk keefektifannya pajak bisa dijadikan sebagai penguat pembiayaan ukuran yang biasanya di pakai sektor swasta bisa juga di gunakan di sektor Pemerintah daerah sebagai ukuran pembelian berdasarkan ukuran dari Faktur/ Spt pajak, sehingga rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja) berjalan dengan baik dan terkontrol.

Dari hal yang tersebut di atas penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan Pengisian SPT pajak dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dengan tujuan agar mencapai kondisi anggaran yang riil. Hasil analisis dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dengan di perkuat oleh SPT Pajak dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.

Kata kunci : Partisipasi Anggaran, Kinerja Aparat Pemerintah Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak bulanan/tahunan dan Komitmen Organisasi.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak bergulirnya otonomi daerah sampai dengan sekarang 2013 Anggaran (RASK) banyak di teliti agar anggaran tersebut menjadi efektif, serta dalam rangka meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas. berdasarkan hal tersebut diatas, mengingat masih adanya pergesekan antara pegawai pemerintah dalam menentukan Anggaran mengenai tanggung jawab yang di embanya, yang di dalamnya terdapat berbagai kepentingan Individu maupun organisasi, serta pengawasan yang tidak memadai dan banyaknya kesimpang dalam anggaran, padahal Pendapatan dan belanja daerah (dinas) yang bersumber dari anggaran (RASK) memuat standar analisis belanja dan ukuran kinerja serta standar biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja. Sementara itu dalam hal lain menurut putranto (1999) untuk keefektifannya pajak bisa dijadikan sebagai penguat pembiayaan ukuran yang biasanya di pakai sektor swasta bisa juga di gunakan di sektor Pemerintah daerah sebagai ukuran pembelian berdasarkan ukuran dari Faktur/ Spt pajak. Sedangkan Anggaran Pemerintah daerah diatur oleh Permendagri Nomor 16 tahun 2013 Proses mengatur tentang anggaran daerah. Regulasi tersebut menjelaskan tentang pedoman dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). Anggaran pada sektor pemerintahan terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana di setiap program dan aktivitas. Dana yang digunakan dalam setiap program tersebut merupakan dana milik rakyat. Mengingat anggaran sektor publik di mana anggaran dari sektor publik berasal dari rakyat yang di pungut melalui pajak, retribusi, laba perusahaan milik daerah.

Penyusunan anggaran membutuhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyusun format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Wulandari (2011) menyatakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang dimaksud dalam penyusunan RKA-SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta hubungan antara besaran anggaran (beban kerja dan gaji yang di dapat) sehingga dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dapat dianggarkan sesuai dengan kondisi yang Riil, serta dalam hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk dapat mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, efektif dan transparan yang benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat.

Selain itu (Adi,2006) mengemukakan bahwa dengan adanya tuntutan pemerintah daerah(kasi/ manajer tingkat bawah dan menengah) yang ikut berpartisipasi dalam proses penganggaran, maka dalam hal ini diperlukan Desentralisasi wewenang antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi terutama yang bersifat informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya (Adi 2006). Di samping memberikan informasi kepada atasan, bawahan juga harus ikut serta dalam penyusunan anggaran yaitu tertuang dalam SPT/ faktur pajak.

Partisipasi menurut Brownel Bratakusuma (2008) adalah suatu perilaku, pekerjaan, dan aktifitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah selama aktivitas penyusunan anggaran yang berlangsung. Dalam hal ini Mahoney et al. dalam Handoko (1996) Mengemukakan bahwa manajemen mempunyai fungsi-fungsi yang meliputi perencanaan, pemilihan staf, negosiasi dan perwakilan. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah sedangkan menurut Khoirudin (1993) Beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat Pengaruh variabel moderating tersebut dapat bersifat positif maupun negatif (Sterdy, 1960, Bryan, 1967, Locke, 1967, dalam Riyadi, 2000). Sedangkan menurut (Murray, (1990) dalam Riyadi 2000) Variabel moderating adalah faktor atau variabel yang mempengaruhi hubungan antara dua variabel. Selain itu Govindarajan (1986) dalam Riyadi (2000) mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan perbedaan dari penelitian tersebut, bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontijensi. Pendekatan ini secara sistematis mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah, mengingat penelitian dalam penyusunan anggaran masih harus banyak di gali mengingat banyaknya ketidak konsistenan.

Putranto (2010) menyatakan SPT baik PPN maupun PPh Pajak merupakan alat control pribadi dan suatu lembaga organisasi sebagai Internal control untuk penyusunan anggaran pemerintahan, Sehingga dari spt PPh maupun PPN tersebut dapat di kontrol Pengeluaran yang ada di departemennya. SPT juga merupakan salah Indikator alat ukur kesejahteraan Pegawai Pemerintah daerah dan merupakan salah satu aspek yang dapat berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah yang bersih, jujur serta berwibawa.

Menurut Putranto (2010) dalam hal ini pula menyatakan bahwa SPT juga merupakan memiliki tiga Ukuran yaitu : Pertama, SPT merupakan kondisi emosional dan pikiran seseorang terhadap Anggaran maupun kualitas layanan yang tertuang dalam PPh maupun PPN dan terdapat dalam anggaran, Maka dalam hal ini tidak dapat unsur menduga penghasilan seseorang. Kedua, SPT merupakan tingkat ukuran keberhasilan kerja sehingga kerja sering ditentukan oleh sejauh mana hasil kerja memenuhi harapan organisasi dan seseorang dalam pekerjaannya. Ketiga, SPT Pajak Juga mencerminkan hubungan dengan berbagai sikap lainnya daripada individual serta organisasi didalam (pemerintahan yang dipimpinnya ada tanggung jawab yang jelas) yang berasal dari kejujuran dan berwibawa kerja seseorang. Penelitian mengenai Penyusunan Anggaran banyak ketidak konsistenan, Beberapa penelitian yang tidak konsisten maka dalam hal ini (Brownell dan Mc linnes (1986) didalam Indiantoro,2009) menyatakan bahwa yang berhubungan dengan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Milani (1975): Brownell dan Hirst (1986) dalam Sukardi, 2005), menemukan hasil tidak signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan dalam Penelitian Alim (2008) Hal tersebut dapat terjadi karena partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah itu tergantung pada faktor-faktor situasional (variabel kontingensi/ Moderating) di mana variabel ini memberikan gambaran pada kondisi pada saat itu.

Menurut Widiyanto (2007) menyatakan bahwa di setiap organisasi memiliki tujuan untuk mencapai kinerja seoptimal mungkin, untuk mencapai kinerja yang optimal tidak terlepas dari

kepuasan kerja aparat pemerintah daerah dan komitmen organisasi, sebagai bentuk profesionalisme pegawai pemerintah dalam tugas dan pelaksanaan mempunyai kebijakan yang telah ditentukan, sangat diperlukan bagi terwujudnya kualitas kinerja bagi aparatur negara yang berorientasi pada mutu pelayanan publik (publik service). Menurut (Sardjito, 2004: 619) komitmen organisasi adalah sejauh mana komitmen organisasi tadi di patuhi oleh pegawai pemerintah daerah memihak pada suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi dengan dorongan dari dirinya sendiri serta mematuhi komitmen yang ada di organisasi (dinas) tempatnya bekerja.

Menurut Sardjito (2007) Apabila komitmen organisasi itu rendah maka akan membuat individu berbuat berkeinginan untuk kepentingan pribadinya, serta perlunya alat control dengan demikian dengan komitmen organisasi yang tinggi maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula. Komitmen organisasi merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan. (hermanus, 2009) dalam hal ini mengatakan bahwa selain komitmen organisasi yang tinggi serta di dorong dari kemauan individu untuk melaksanakan juga di perlukan alat control/ pengawasan yaitu di atas SPT (Faktur Pajak) sehingga anggaran tersebut tercapai semaksimal mungkin dan terukur dari kegiatan organisasi yang mempengaruhi anggaran, sehingga mengurangi pembiayaan yang tidak terukur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Pernyataan diatas bahwa untuk menilai Ketepatan Anggaran banyak factor yang mempengaruhi diantaranya untuk tercapainya kinerja pegawai pemerintah daerah yang baik dalam penyusunan anggaran yang riil terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah maka dalam hal ini peneliti mengajukan pendekatan kontijensi dimana perlu adanya dalam penyusunan anggaran tersebut karena Mengingat hal tersebut bersifat kondisional maka di perlukan variable kontijensi dalam kondisi yang riil yaitu : pajak Tahunan (SPT) dan komitmen Organisasi di dalam kinerja aparat pemerintah daerah sebagai variabel moderating, sehingga dalam penelitian ini memasukan 2 variabel moderating yang diharapkan bisa memberika masukan kepada pemerintah daerah yang di teliti maka dalam hal ini peneliti mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat hubungan fungsional yang signifikan dan positif Antara Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dengan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Pegawai pemerintah daerah ?
2. Apakah terdapat hubungan fungsional yang signifikan dan positif antara komitmen organisasi dengan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah ?
3. Apakah terdapat Interaksi hubungan fungsional yang signifikan dan positif antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan kinerja pegawai Pemerintah daerah serta dengan komitmen organisasi serta SPT pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berikut ini tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk menguji dan memberi bukti yang nyata tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap Anggaran daerah dengan SPT Pajak dan Komitmen Organisasi sebagai variable moderating.
2. Untuk menguji dan memberi bukti yang nyata tentang apakah SPT Pajak dapat memberikan pengaruh positif antara partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah Sidoarjo. Serta untuk menguji dan memberi bukti yang empiris tentang apakah komitmen organisasi berpengaruh positif antara pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah di daerah Sidoarjo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah daerah :

Bahwa Hasil dari penelitian ini Peneliti Mengharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten (Dinas) yang ada di kabupaten Sidoarjo supaya tepat sasaran serta memberikan dalam menentukan Anggaran.

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini bagi akademisi penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan yang bermanfaat menambah ilmu pengetahuan, serta sebagai bahan masukan bagi peneliti yang lain, serta memberikan informasi dapat menambah variabel moderating mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja pegawai pemerintah daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kontijensi

Alim (2006) menyatakan bahwa dalam partisipasi penyusunan anggaran mempunyai sifat kondisional maka di perlukan penggunaan teori kontijensi karena di dalamnya terdapat situasi yang kondisional sehingga perlu di kaji selain itu ada ketidak konsistenan antara peneliti. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini peneliti mengajukan teori kontijensi dalam penelitian ini yaitu SPT Pajak dan komitmen organisasi sehingga tercapai anggaran yang riil sehingga kinerja kinerja aparat pemerintah daerah menjadi kondisi yang Riil serta tercapainya aparat yang bersih dan berwibawa.

2.1.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Anggaran adalah merupakan alat ukur Individual dan keberhasilan suatu Organisasi sehingga untuk menunjukkan evaluasi di perlukan variabel kontijensi hal ini di sebabkan karena adanya sifat yang kondisional bahwa Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Menurut (Indriantoro,1993 dan Purwanto, 2009 dalam Wulandari, 2011) menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah. Sehingga dalam hal ini terjadi karena hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah tergantung pada faktor-faktor situasional atau lebih dikenal dengan variabel kontingensi (contingency variable). Pendekatan kontingensi menyebabkan adanya variabel-variabel lain yang bertindak sebagai variabel moderating. Sedangkan Menurut Adi (2006) Mengemukakan bahwa partisipasi Penyusunan Anggaran Adalah adalah merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan oleh pegawai pemerintah daerah yang terukur dan terorganisasi. Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan dikarenakan agar anggaran yang dibuat sesuai dengan realita/kenyataan yang ada. Herman (2009) menyatakan bahwa partisipasi kepala Seksi/ bagian dalam penyusunan anggaran dapat menimbulkan menyumbangkan informasi yang riil , sehingga meningkatkan adanya kerjasama (team work) yang baik antara atasan dan bawahan, serta meningkatkan adanya kontrol yang baik antar pegawai pemerintah daerah sehingga mencapai kondisi yang riil atau nyata.

Dalam hal ini Mardiasmo (2005) Menyatakan bahwa di dalam partisipasi penyusunan anggaran pada akuntansi sektor Publik terdapat tahap di dalam penyusunan Anggaran Yaitu:

1. Tahap persiapan anggaran

Pada tahapan ini di harapkan untuk menaksir pengeluaran berdasarkan anggaran yang di terima Pemerintah daerah. Terkait hal tersebut maka di perlukan kerjasama antar bagian serta pengawasan atau Internal control serta adanya tanggung jawab yang jelas.

2. Tahap Ratifikasi

Tahap ratifikasi ini melibatkan Pimpinan eksekutif dituntut memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill dan coalition building yang memadai, serta integritas, karena dalam tahap ini pimpinan kepala bagian harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan dari pihak legislative, melalui laporan kasi-kasi yang disusun berdasarkan rapat yang di terima oleh umum.

3. Tahap implementasi /pelaksanaan anggaran

Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting dan harus oleh Kepala bagian keuangan. Maka dalam hal ini kepala bagian keuangan di pemerintah daerah harus mempunyai sebuah sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian intern berupa Spt pajak serta bagaimana pegawai di pemerintah daerah tersebut mentaati apa yang ada di system itu.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran

Sedangkan dalam hal lain Siegel *et al.* (1989) dalam Nazzaruddin (1998) mengemukakan beberapa manfaat partisipasi anggaran menurut adalah:

Seseorang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran tidak saja *task involved* juga *ego involved* dalam kerjasama.

Seseorang akan meningkatkan rasa kebersamaan dalam kelompok, karena dapat meningkatkan kerjasama antara anggota kelompok penetapan sasaran, serta dapat mengurangi rasa tertekan.

Keterlibatan seseorang akan mengurangi rasa keperbedaan di dalam mengalokasikan sumber daya di antara unit-unit yang ada dalam organisasi.

Adanya pengawasan dari seorang pemimpin lini tengah serta Pemimpin lini atas yang ada di pemerintah daerah tersebut

Bukti empiris yang dilaporkan oleh Govindarajan (1986) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran secara khusus memberi manfaat bagi operasi pusat pertanggungjawaban ketika organisasi di hadapkan pada ketidakpastian lingkungan. Diikuti sertakannya pemimpin pusat pertanggungjawaban dalam proses penyusunan anggaran merupakan bagian terpenting, karena mereka yang paling mengetahui informasi tentang variabel yang dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya.

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas dan transparansi.. Dalam hal ini saragih (2009) menyatakan bahwa dalam melakukan suatu pelaporan Anggaran tahap akhir di harapkan untuk melakukan suatu perubahan dari yang bersifat akuntabilitas ada tahapan yang berupa transparansi public yang bersifat umum. Artinya Waupun Anggaran di bentuk di buat berdasarkan realita, akuntabilitas dan transparansi, bukan berarti transparansi harus di buka semua ke publik namun ada pula yang bersifat rahasia yang hanya di ketahui oleh beberapa kalangan pegawai pemerintah daerah tertentu yang mengetahuinya (Yang berhubungan dengan kepentingan publik saja).

2.1.3 Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai pemerintah daerah (bagian keuangan) hal ini di ukur dari ukuran kinerja keuangan. Menurut Handoko (2006) Menyatakan kinerja yang baik menunjukkan bahwa tugas-tugas manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, dalam pengaturan staf, negosiasi dan representasi. Sedangkan Menurut Heru (2010) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan kinerja pegawai pemerintah daerah rendah diantaranya karena proses perencanaan penyusunan Anggaran yang kurang matang, hal ini di sebabkan karena adanya pertanggungjawaban yang saling tumpang tindih. Selain itu Menurut Miah (1996) Dengan Perencanaan yang baik serta koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan, menyebabkan banyak program dan kegiatan yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan/ keterlambatan Informasi, penyebabnya karena KomitmenMaka dari itu Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan di dalam kinerja tersebut, berikut ini adalah beberapa tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan kinerja menurut ISO 2011 ada beberapa Indikator yang bisa diambil yang harus di penuhi misalnya:

- a. Ukuran biaya : Biaya total dari unit- unit atau bagian yang ada di dalam bagian kantor yang harus di pertanggung jawabkan (Pembelian kebutuhan Pegawai Pemerintah daerah) .
- b. Ukuran waktu : Jam kerja pegawai serta pekerjaan yang mampu dikerjakan pegawai pada jam kantor yang di tentukan.
- c. Ukuran ketelitian : Ketelitian Pegawai dalam meberikan pelayanan dalam bidang keuangan serta Administrasi dalam Pelayanan.
- d. Ukuran Pekerjaan terselesaikan : Jumlah Pegawai yang memadai dalam hal ini memperkirakan berapa kapasitas yang di layani

- e. Ukuran Fasilitas tersedia : Fasilitas kantor yang harus di control pada bulan-bulan tertentu untuk kebutuhan.
- f. Indikator Kualitas pelayanan Publik : Administrasi yang tidak panjang atau menyulitkan pengguna fasilitas administrasi sehingga mudah di control, atau saling mengontrol menggunakan kotak layanan sebagai perwujudan pelayanan yang baik.

Sedangkan untuk hal yang lain di sebutkan bahwa dalam penelitian Murray (2008) untuk mencapai hasil yang maksimal maka pembelian barang kebutuhan dalam kantor sebaiknya menggunakan SPT pajak artinya pembelian kebutuhan kantor memilih yang mempunyai legalitas pajak sehingga pengeluaran dapat di control serta memperbaiki Internal control di pemerintah daerah tersebut. Selain itu di harapkan pemerintah daerah tersebut mengotrol hal tersebut agar anggaran tersusun secara riil.

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kinerja pegawai pemerintah daerah merupakan perwujudan dar kemajuan suatu daerah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Jones (1999) terdiri dari motivasi, kemampuan, pengetahuan, keahlian, pendidikan, pengalaman, pelatihan, minat, sikap kepribadian kondisi-kondisi fisik dan kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial dan kebutuhan egoistik. Sehingga dapat menetapkan Visi dan Misi, Merumuskan indikator kinerja Pegawai serta mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Dengan demikian maka untuk mengevaluasi kinerja aparat pemerintah daerah maka akan diketahui seberapa besar tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Kinerja aparat pemerintahan dinilai dari bagaimana anggota-anggota dalam sektor pemerintahan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di organisasinya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Ven dalam Ferry (1980) menyatakan bahwa kinerja merupakan prestasi kerja yang dicapai unit kerja dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. Instrumen kinerja terkait dengan pencapaian target kinerja kegiatan dari suatu program, akurasi (ketepatan dan kesesuaian) hasil, tingkat pencapaian program, dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat, kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran, pencapaian efisiensi operasional, perilaku pegawai.

2.1.5 Komitmen Organisasi

Dalam Komitmen Organisasi ada 3 jenis komitmen menurut burhan (2000) yaitu : Affective commitment yaitu suatu kondisi yang menunjukkan keinginan pegawai untuk melibatkan diri dan mengidentifikasi diri dengan organisasi karena adanya kesesuaian nilai-nilai dalam organisasi atau seberapa jauh tingkat emosi keterlibatan langsung dalam organisasi. Dalam keadaan yang Normative komitmen akan muncul karena karyawan berkewajiban untuk tinggal dalam organisasi seperti kesetiaan, kebanggaan, kebahagiaan, dan lain-lain. Sedangkan dalam keadaan seperti itu maka akan timbul komitmen ketidak kekhawatiran akan hilang karena antara pegawai dengan pimpinan artinya di berikan kenyamanan dalam bekerja serta menyatakan kemandirian bekerja ada pensiunan serta adanya asuransi apabila pegawai ada yang sakit, dalam hal ini pula Purwanto (2004) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Dorongan yang ada pada setiap individu dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan dapat meningkatkan kinerja manajerial. Hendra (1999) mengemukakan bahwa komitmen organisasi adalah kuatnya keterlibatan antara masyarakat, pimpinan kantor serta keterlibatan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya maka dalam hal ini individu tersebut dapat mendapatkan manfaat apabila mendapatkan seperti : uang pensiun, fasilitas dan Kepangkatan.

Herman (2005) mengemukakan bahwa Pegawai pada dasarnya mempunyai hal-hal /Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen terhadap organisasi antara lain karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan pengalaman kerja. Sedangkan (Ramli) mengemukakan bahwa Komitmen organisasi itu sendiri mempunyai tiga komponen yaitu keyakinan yang kuat dari seseorang dan

penerimaan tujuan organisasi, kemauan seseorang untuk berusaha keras bergantung pada organisasi, dan keinginan seseorang yang terbatas untuk mempertahankan keanggotaan. Semakin kuat komitmen, semakin kuat kecenderungan seseorang untuk diarahkan pada tindakan sesuai dengan standar (Imronudin, 2004). Komitmen dianggap penting bagi organisasi karena: (1) Pengaruhnya pada turnover, (2) Hubungannya dengan kinerja yang mengasumsikan bahwa individu yang memiliki komitmen cenderung mengembangkan upaya yang lebih besar pada pekerjaan (Morrison, 1997).

2.2.1 Metode Penelitian/ Kerangka Pemikiran

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Dalam kerangka konseptual dibawah ini dapat diuraikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi oleh kinerja aparat pemerintah daerah, dimana kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating yang mempengaruhi variabel dependen dan independen. Secara skematis gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dituangkan sebagai berikut :

Berdasar landasan teori dan rumusan penelitian, diidentifikasi satu variabel independen yaitu partisipasi penyusunan anggaran, satu variabel dependen yaitu kinerja aparat pemerintah daerah dan kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Komitmen merupakan salah satu aspek yang dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap hubungan antara penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah. Komitmen organisasi dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah

Dalam organisasi sektor publik, partisipasi anggaran dan pengukuran kinerja tidak sebatas pada masalah pemakaian anggaran, namun pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek yang dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan kinerja. Aspek-aspek yang dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien seperti masukan, kualitas, keluaran, hasil, efisiensi. Dalam hal ini penyusunan anggaran digunakan Kinerja Aparat Pemerintah daerah.

2.3.2. Penyusunan Anggaran

Lewin (1970) dalam Alim (1973) Menyatakan bahwa Komitmen Organisasi dalam pendekatan kinerja dalam hal ini maka setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan tercapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran (Kepmendagri No 13 tahun 2006), serta Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kinerja aparat pemerintah daerah. Menurut Agyris (1952) dalam Adi (2006) untuk mencegah dampak fungsional atau disfungsional, sikap dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan bawahan (manajer level menengah atau Kasi). Sehingga partisipasi anggaran dapat mencerminkan keadaan suatu kantor tersebut serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan/ kinerja terhadap masyarakat. Selain itu Menurut Mahoney, T.A. and Jerdee (1963) dalam penelitiannya menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Namun demikian hasil penelitian doni (2007) menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang tidak signifikan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini di pengaruhi oleh berbagai hal misalnya: keadaan tempat bekerja seperti (kurangnya pegawai selain itu banyaknya tekanan dari atasan) sehingga anggaran tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan oleh dinas atau kantor tersebut. Sesuai dengan dari hasil diatas karena tidak terjadi ke konsistenan maka dalam hal ini seorang pegawai pemerintah daerah dalam menyusun anggaran melibatkan wewenang serta tanggung jawab

Pengujian ketidak konsistenan tersebut dan mencapai hasil yang diinginkan serta tercapainya pelayanan yang baik serta mendapatkan fasilitas dan situasi yang kondusif antara atasan dengan pegawai serta terjadinya wewenang antara atasan dengan bawahan

H1 : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap aparat pemerintah daerah.

2.3.3 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah dengan Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri (Weiner dalam Coryanata,2002). Kecukupan anggaran tidak hanya secara langsung meningkatkan prestasi kerja, tetapi juga secara tidak langsung (moderasi) melalui komitmen organisasi. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996). Komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula (Randall ,1990 dalam Nouri dan Parker, 1998). Berdasarkan hasil pernyataan diatas yang berkaitan dengan komitmen organisasi, ditentukan bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi penyusunan anggaran dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah.

H2 : Komitmen organisasi berpengaruh signifikan partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

2.3.4 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah dengan SPT Pajak

Menurut rochmat sumitro (1988:12): "Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum". "Dapat di paksakan" mempunyai arti, apabila utang pajak tidak di bayar,utang tersebut di tagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut.

1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang
2. Jasa timbal tidak di tunjukkan secara langsung
3. Pajak dipungut oleh pemerintah,baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Dapat di paksakan (bersifat yuridis)

Menurut Brotodiharjo, R (1982:2) : "Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan,dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang dapat di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah". Dari definisi di atas Pajak Merupakan Alat ukur untuk mencegah adanya unsur kepentingan pribadi dalam menetapkan Anggaran Kepuasan kerja juga dapat menjadi tolak ukur hasil dari kinerja aparat pemerintah dalam penyusunan anggaran. Resmi (2010) mengemukakan Pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja aparat pemerintah, serta mengungkapkan bahwa dari 47 kasus yang telah diteliti, beberapa diantaranya mencantumkan SPT Pajak dengan alasan sebagai penetapan anggaran secara pasti. Namun demikian Baron (2003) dalam Mengemukakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak tahunan tidak memperkuat hubungan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Sedangkan Morissa (2010) mengemukakan SPT berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Jika pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian berupa SPT pajak yang baik, maka diharapkan pelaporan dan evaluasi anggaran tidak akan menemukan penyalahgunaan wewenang.

Hasil penelitian yang dilakukan Putranto (2007) menyatakan bahwa SPT Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penyusunan anggaran dalam mewujudkan kinerja aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa, sedangkan menurut Sudaryono (1994) juga menunjukkan bahwa SPT pajak

berpengaruh positif terhadap partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajer. Secara singkat ditentukan bahwa SPT Pajak mempunyai pengaruh terhadap partisipasi penyusunan anggaran dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah.

H3 : SPT berpengaruh signifikan dan positif terhadap partisipasi anggaran terhadap kinerja Pegawai pemerintah daerah.

Menurut Widiyanto (2007) menyatakan bahwa di setiap organisasi memiliki tujuan untuk mencapai kinerja seoptimal mungkin, untuk mencapai kinerja yang optimal tidak terlepas dari kepuasan kerja aparat pemerintah daerah dan komitmen organisasi, sebagai bentuk profesionalisme pegawai pemerintah dalam tugas dan pelaksanaan mempunyai kebijakan yang telah ditentukan, sangat diperlukan bagi terwujudnya kualitas kinerja bagi aparatur negara yang berorientasi pada mutu pelayanan publik (publik service). Menurut (Widiyanto, (2007) pula bahwa komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan serta lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri, Selain itu dalam hal lain komitmen organisasi yang menjadi tolak ukur sejauh mana aparat pemerintah daerah memihak pada suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Dalam hal ini pula (Sumarno, 2005) mengemukakan bahwa dalam Memberikan pekerjaan individu yang nilainya tidak selaras dengan nilai dalam organisasi yang ada, maka akan cenderung menghasilkan karyawan yang kurang memiliki motivasi dan komitmen, serta yang tidak terpuaskan oleh pekerjaan mereka dan oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini dengan mempunyai komitmen organisasi yang kuat maka hal itu akan mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Selain mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan, komitmen yang tinggi juga dapat menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadinya dan berusaha untuk membentuk organisasi yang baik sesuai dengan yang di harapkan. Menurut Sardjito (2007) Apabila komitmen organisasi itu rendah maka akan membuat individu berbuat berkeinginan untuk kepentingan pribadinya. Namun demikian dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula. Komitmen organisasi merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan. Hal lain menunjukkan bahwa di atas SPT (Faktur Pajak) merupakan alat ukur agar anggaran tersebut tercapai semaksimal mungkin dan terukur dari pembelian yang tercatat sehingga pengeluaran dapat di control / mengurangi pembiayaan yang tidak terukur.

Bahwa dengan kinerja aparat pemerintah daerah menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Milani (1975): Brownell dan Hirst (1986) dalam Sukardi, 2002), menemukan hasil tidak signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.

H4 : Interaksi antara partisipasi penyusunan Anggaran, SPT pajak, Komitmen organisasi, berpengaruh signifikan dan positif signifikan terhadap kinerja Pegawai pemerintah daerah

3.0. Metode Penelitian

3.1. Model Hubungan antara Variabel Penelitian

Model ini merupakan suatu pemikiran yang di formulasikan dari kajian teoritis, hasil penelitian sebelumnya, dan temuan fenomena yang hendak di teliti.

Variabel X1 terhadap Y, Variabel X1 terhadap X2, Variabel X1 terhadap X3, variabel X1, X2, X3, terhadap Y.

Keterangan Variabel-variabel yang dapat di bentuk dari pernyataan di atas :

X1= Partisipasi Penyusunan Anggaran

X2= SPT Pajak

X3= Komitmen Organisasi

Y= Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah

3.2.1 Uji Asumsi Klasik

Dalam penggunaan model regresi moderating analisis yang di gunakan untuk membuat interaksi antara satu variable terikat dan beberapa variable bebas adapun syarat yang harus di penuhi adalah ;

3.2.2 Uji Linieritas

Uji Asumsi ini untuk melihat apakah spesifikasi model yang di gunakan sudah benar atau belum dalam penelitian ini uji linieritas menggunakan diagnose scatter plot residual di mana yang di tunjukan adalah gambar uji normalitas, gambar normal plot probabilitas menjelaskan bahwa residual-residual terdistribusi secara random dan terkumpul disekitar garis lurus (lampiran scatter plot uji linieritas) ini berarti dapat di katakana bahwa asumsi ini menunjukkan spesifikasi model yang di pergunakan sudah benar.

3.2.3 Uji Multikolinieritas

Kolinieritas artinya tidak ada hubungan linier. Multikolinieritas artinya bahwa variable-variabel bebas dalam persamaan tidak berkorelasi/ berkorelasi rendah. $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$: X_1, X_2, X_3 adalah variabel bebas dan y adalah variable tergantung dalam hal ini multikolinieritas mensyaratkan X_1, x_2, x_3 dapat di lihat pada table rank spearman rank disini tampak X_1, X_2, X_2 berkorelasi rendah (variable independen) mengenai y adalah variable dependen (tidak di perhitungkan korelasinya) jadi dikatakan tidak terjadi multikolinieritas dengan demikian model memenuhi syarat.

Tabel 1 hasil Pengujian Multikolinieritas

	X ₁	X ₂	X ₃
X ₁	1	0,023	0,158
X ₂	0,020	1	0,111
X ₃	0,158	0,120	1

Sedangkan hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada satu variable independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, yakni masing-masing 1,031 (X₁), 1,018 (X₂), 1,049 (X₃) jadi dapat dikatakan tidak ada multikolinieritas antara variable independen dalam model regresi.

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varians dari residual satu kepengamatan yang lain jika berbeda disebut heteroskedastisitas, jika sama disebut homoskedastisitas. Dalam penelitian ini di gunakan diagnosa diagram plot. Dalam tampilan grafik scatter plot atau diagram pencar bila titik-titik menyebar secara acak dan sebarannya berada di atas di bawah angka 0 pada sumbu y . hal ini berarti terjadi homoskedastisitas artinya model memenuhi syarat sehingga model layak untuk memprediksi kinerja pemimpin berdasarkan masukan X_1, X_2, X_3 .

4.2.1 Hasil Uji hipotesis

Uji hipotesis penelitian menyatakan bahwa : Dari hasil persamaan di atas maka persamaan tersebut menggambarkan bahwa ketiga variable independent yang merupakan masukan dalam model regresi di atas jika salah satu X berubah sebesar 1 sedangkan lainnya konstan maka maksimum

perubahan y adalah sebesar nilai koefisien β dan x tersebut. Untuk membuktikan hipotesis penelitian maka berdasarkan hasil perhitungan pada table di atas akan di uraikan berikut ini:

A. Hipotesis penelitian pertama (H_1)

H_1 di tolak, yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran (X_1) menunjukkan bahwa interaksi desentralisasi dengan partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan sebesar -1383 dengan tingkat signifikan dengan $\rho=0,187 > 0,05$

B. Hipotesis penelitian kedua (H_2)

H_2 ditolak, yang menyatakan bahwa desentralisasi (X_2) berpengaruh positif terhadap efektifitas partisipasi penyusunan anggaran (X_2) dalam mempengaruhi kinerja pemimpin (y), karena dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa β interaksi desentralisasi dengan partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan negative sebesar $-72,475$ dengan tingkat signifikansi atau $\rho = 0,097 > 0,05$

C. Hipotesis penelitian ketiga (H_3)

H_3 ditolak, yang menyatakan bahwa Komitmen organisasi (X_3) berpengaruh negatif terhadap efektifitas partisipasi penyusunan anggaran (X_1) dalam mempengaruhi kinerja pemimpin (y), karena dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa β interaksi desentralisasi dengan partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan negative sebesar $-71,456$ dengan tingkat signifikansi atau $\rho= 0,059 > 0,05$

D. Hipotesis penelitian keempat (H_4)

H_4 diterima, yang menyatakan bahwa desentralisasi (X_2), dukungan organisasi (X_3) berpengaruh positif terhadap efektifitas partisipasi penyusunan anggaran (X_1) dalam mempengaruhi kinerja pemimpin (y) karena hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa interaksi desentralisasi dan dukungan organisasi terhadap partisipasi penyusunan anggaran secara simultan menunjukkan angka positif sebesar $109,567$ dengan tingkat signifikansi atau $\rho = 0,064 < 0,05$.

4.2.2 Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasar temuan pada penelitian ini dapat menghasilkan persamaan yang di jadikan dasar intrepetasi adalah sebagai berikut:

$$Y=52,927-1,383 X_1+2,409 X_2-0,242 X_3-72,375 X_1X_2-71,456X_1X_3+109,567X_1X_2X_3$$

4.2.3 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Berdasarkan persamaan di atas di cermati bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran menghasilkan koefisien negative sebesar $X_1= -1,578$, dengan signifikan $= 0,188 > 0,05$ artinya menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak berpengaruh dalam mendukung kinerja Pegawai pemerintah daerah sidoarjo.

Bukti empiris yang di temukan dalam proses penyusunan anggaran di pemerintah daerah yaitu : di dinas yang berada di daerah Pemerintah kota sidoarjo, Dalam partisipasi Penyusunan anggaran, para pemimpin puncak (kepala dinas) dan kabag (Pemimpin Menengah) sebaiknya mengontrol pengeluaran, pembelian, serta pemasukan anggaran yang di jalankan oleh para Kasubsi (pemimpin lini), Sehingga menunjukkan naik turunya anggaran.

Menurut hasil penelitian sethon (1986) dalam Aristiawan (2009) partisipasi Anggaran sebaiknya di lakukan oleh semua pegawai pemerintah baik level atas maupun bawah serta Pemimpin puncak dan memberikan komitmen kepada bawahan untuk memberikan dukungannya dengan mendesentralisasikan wewenangnya sedangkan pemimpin level atas dapat mengontrol dari anggaran dalam hal ini (SPT pajak) yang di berikan oleh bawahan sehingga anggaranya menjadi lebih riil (tidak terjadi kesimpang siuran anggaran, serta sebaiknya bawahan berkomitmen terhadap atasan dengan memberikan informasinya untuk di buat kesepakatan sehingga penerimaan, pengeluaran, dan pembelian lebih terukur.

4.2.3 Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Surat Pemberitahuan pajak Tahunan

Hubungan Antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemimpin setelah di interaksi di tunjukan dengan koefisien negative $X_1, X_2 = -72,475$ signifikan $0,097 > 0,05$ artinya : partisipasi dalam efektifitas penyusunan tetap tidak mendukung walaupun ada Surat pemberitahuan pajak tahunan.

Bukti yang di temukan penelitian ini bahwa dalam Pada Proses Penyusunan Anggaran dalam pelimpahan wewenang, dalam partisipasi penyusunan Anggaran banyaknya transaksi yang tidak menggunakan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT pajak) sehingga anggaran yang di gunakan tidak ada kesepakatan.

Temuan ini sesuai dengan penelitian putranto (2009) yang mengemukakan bahwa dalam proses partisipasi dalam penyusunan anggaran akan lebih riil apabila pemimpin dalam mendesentralisasikan wewenangnya, sedangkan SPT pajak dijadikan sebagai alat control dari bawahan (kasubsi dan staff anggaran) yang melaksanakan pelaksanaan anggaran.

4.2.4. Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Komitmen Organisasi

Hubungan Antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemimpin setelah di interaksi di tunjukan dengan koefisien negative $X_1, X_2 = -71,456$ signifikan $0,059 > 0,05$ artinya : partisipasi dalam efektifitas penyusunan tetap artinya bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak di susun berdasarkan komitmen organisasi tertulis yang ada.

Bukti yang di temukan dalam proses penyusunan anggaran di pemerintahan daerah dinas yang berada di kabupaten pemerintah kota sidoarjo disusun oleh para kepala dinas (pemimpin puncak), Kabag pemimpin menengah menjalankan Komitmen Organisasi tetapi pada level kasubsi (pemimpin lini) dan Staff (Anggaran) komitmen organisasinya tumpang tindih (tidak Ada kejelasan tanggung jawabnya).

Menurut Badjuri (2009) menyatakan bahwa di dalam organisasi keterlibatan seseorang dalam proses ini tentunya tidak terlepas dari perilaku diantaranya : rasa kuatir/cemburu, serta mendapatkan tanggung jawab dari masing-masing individu sebagai akibat dari adanya kenaikan (jabatan). Sedangkan Nurcholih (2009) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah komitmen di dalam organisasi, apabila di jalankan dengan dorongan dari dalam individu yang kuat komitmen tersebut akan mencapai tujuan organisasi serta memberikan yang terbaik serta lebih mengutamakan komitmen organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri, dan dalam hal lain suherman (2008) ketegasan dalam pengawasan, serta menyatakan bahwa komitmen organisasi itu lebih bergantung pada tercapai win-win solution berupa target, kinerja, serta mendapatkan kepuasan berupa gaji dan jabatan.

5.1 Kesimpulan dan saran

1. Mendasarkan persamaan diatas dapat di cermati bahwa partisipasi dalam usunan anggaran menghasilkan koefisien negatif, hal ini menunjukan Arah dalam penelitian ini, bahwa keterlibatan atasan dan bawahan berbagai jenjang partisipasi dalam penyusunan anggaran harus menunjukan tidak menjalankan komitmen dengan baik serta pengawasan yang terkontrol sedangkan SPT pajak yang ada tidak di gunakan untuk mengukur.
2. Pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran setelah berinteraksi dengan SPT pajak ditunjukan dengan koefisiennya negatif, hal ini menunjukan bahwa dalam menjalankan anggaran, SPT/ faktur pajak, tidak di gunakan untuk mengukur, hanya di gunakan sebagai pelengkap saja.
3. Interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan komitmen organisasi menunjukan koefisiennya negative, hal ini menunjukan bahwa dalam organisasi tersebut menunjukan sifat individualistis yang tinggi (sehingga tanggung jawabnya menjadi tumpang tindih) selain itu pula juga di pengaruhi oleh faktor internal berupa lingkungan kerja, gaji, kesempatan promosi, supervisi.
4. Pengujian Three way interaksi x_1, x_2, x_3 terhadap kinerja pemimpin (y) adalah signifikan dan positif, Hal ini menunjukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran akan menaikkan kinerja pegawai dinas jika terdapat kerja sama yang baik yaitu y_s -fig antara sesama Individu dan organisasi (kerjasama sesuai dengan bagian yang di pegang)

5.1.1 Keterbatasan

Isi kesimpulan atas hasil penelitian ini masih bersifat temporer dan terbuka untuk dikaji ulang oleh para peneliti lainnya di masa yang akan datang dan dalam hal ini peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya :

1. Responden pada penelitian yang di pilih adaah dinas yang berada di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hal ini dikarenakan mengingat keterbatasan waktu, tempat dan biaya.

2. Sulit mengumpulkan data-data dan menyeragamkan nama dalam dinas karena keragaman istilah seperti kasi dan kasubsi, staff dengan kabag, kasubag dengan staf. Maka dalam penelitian ini di seragamkan menjadi kabag, kasubag dan staff.
3. Pada penelitian ini masih terdapat beberapa indikator yang di gunakan untuk mengukur kinerja pemimpin dalam partisipasi penyusunan anggaran (variabel moderating diluar penelitian ini).
4. Penelitian moderating ini hanya meneliti di dinas yang ada di sidoarjo dan bisa di kembangkan ke daerah lain yang mungkin ada kesamaan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi saputra, S. dan Asri, W.R. 1989. *Identifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi Daerah*. edisi ketiga. PT Raja Grafindo. Jakarta h 81-85
- Arikunto S. 2002. *Prosedur penelitian Suatu pendekatan praktek edisi ke 5*. Rineka Cipta Jakarta h 145-156 .
- Alim, N.M 2003. *Pengaruh Ketidak pastian Strategik dan Revisi Anggaran Terhadap Efektivitas Partisipasi Penyusunan Anggaran*. J. (IAI) Ikatan Akuntan Indonesia
- Algifari, 1999. *Analisis Regresi teori dan Kasus Solusi*, edisi ke 2 YKPN Yogyakarta.h. 111-117
- Aswin, 1999. *Tugas-Tugas Manajer yang Berkomitmen*. Edisi Pertama. J. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) h. 18-25
- Aristiawan 2009. *Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemimpin : komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*. Tesis Undip semarang
- Bayu adi, 2006. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemimpin dengan Dukungan Organisasi dan desentralisasi sebagai variable moderating*, J. Unipa Majalah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan bisnis.h1-10.
- Baron, 2009. *Development and Information Diversity on decision Quality in the structured Decisions Task*. J. accounting Organization and Society. 16 (4) p 156-167
- Brata Kusuma, DS dan Dadang S 2005. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Edisi Pertama, Jakarta Gramedia h. 26-38*.
- Brotodiharjo, R 1982. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Edisi kedua. PT Gramedia Widiasarana. Indonesia h. 2-10
- Badjuri, A.K. dan Teguh Y. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi edisi 2*. Undip h.30-48. Semarang.
- Edi Sujiono, 1997. *Operating System with komitmen J*. Accounting organization and Society
- Wulandari 2011. *Pengaruh Parisipasi Penyusunan Anggaran terhadap kinerja Aparat pemerintah daerah komitmen Organisasi sebagai variable moderating*, Skripsi , Universitas diponegoro Semarang.
- Widianto 2004. *Pajak, Komitmen Organisasi yang sehat*. Ganesa. Bandung. h. 23-26.
- Rumuksin, 2009. *Menggunakan komitmen dan Alat kontrol sebagai pengurang kesenjangan social*. J. Ikatan Akuntan Indonesia
- Sanusi, 1999. *Komitmen Organisasi dalam Anggaran*. J Accounting Organisasi dan Society 7 (6): 111-115.

- Sudarsono, 2010. *Teknik Pengisian SPT Pajak edisi kedua*. Gajah Mada. Yogyakarta.
- Sumarno, 2011. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemimpin: Komitmen Organisasi sebagai Variable Moderating*. h. 53-69
- Resmiana, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. 2009. Universitas Indonesia. h. 12-20.
- Nurcholis, H. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi kedua*. PT Gramedia Widiasarana. Indonesia, h. 92-131.
- Nouri Parker, et al. 1996 *Psykologi Dasar Manusia*. Edisi Bahasa Indonesia Jilid II. Wincosin University.
- Putranto, 2007, *Menyelesaikan Masalah keuangan dengan Forensic Pajak*, J. Trisula Membangun Masyarakat ilmiah 2009.
- Ghozali, I. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi kedua. Universitas Diponegoro. Bandung h 34-45
- Republik Indonesia, *Undang-undang Permendagri Nomor 16 tahun 2013 Proses mengatur tentang anggaran daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Satuan Kerja Perangkat Daerah*
- Rochmat sumitro, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Ganesa Yogyakarta. h. 27-36.